

TRATEGI KOMUNIKASI HUMAS KEMENTERIAN PUPR DALAM MENJAGA KEARIFAN LOKAL UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Dian Rosalia¹, Sigit Pramono Hadi²

Program Studi Ilmu Komunikasi, STIKOM Interstudi, Jakarta

Jl. Wijaya II No.62, RT.5/RW.1, Jakarta, Indonesia

Email: diandagu@gmail.com¹, Sigitvt35@gmail.com²

Abstrak. Penelitian ini mengkaji strategi komunikasi yang diimplementasikan oleh Humas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam rangka menjaga kearifan lokal selama proses pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi kasus, penelitian ini mengungkap bagaimana Kementerian PUPR mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal ke dalam kegiatan pembangunan infrastruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Humas Kementerian PUPR telah menerapkan serangkaian strategi komunikasi efektif yang melibatkan sosialisasi, edukasi, dan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahap pembangunan. Keterlibatan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman dan dukungan masyarakat terhadap proyek infrastruktur, tetapi juga memastikan pelestarian nilai-nilai budaya lokal. Penelitian ini memberikan wawasan mengenai pentingnya sinergi antara pembangunan infrastruktur dan pelestarian kearifan lokal melalui strategi komunikasi yang inklusif dan partisipatif, yang dapat dijadikan sebagai model bagi instansi pemerintah lainnya dalam menerapkan pembangunan berkelanjutan.

Kata Kunci : Strategi Komunikasi, Kearifan Lokal, Pembangunan Berkelanjutan, Humas Kementerian PUPR, Partisipasi Masyarakat

Abstract. This study examines the communication strategies implemented by the Public Relations Division of the Ministry of Public Works and Housing (PUPR) in order to preserve local wisdom throughout the sustainable development process in Indonesia. Utilizing a qualitative approach through case study methods, this research reveals how the Ministry of PUPR integrates local wisdom values into infrastructure development activities. The findings indicate that the Public Relations Division of the Ministry of PUPR has implemented a series of effective communication strategies involving socialization, education, and active community participation in every stage of development. This involvement not only enhances community understanding and support for infrastructure projects but also ensures the preservation of local cultural values. This study provides insights into the importance of synergy between infrastructure development and the preservation of local wisdom through inclusive and participatory communication strategies, which can serve as a model for other government agencies in implementing sustainable development.

Keywords: Communication Strategy, Local Wisdom, Sustainable Development, Public Relations of the Ministry of PUPR, Community Participation

PENDAHULUAN

Perkembangan infrastruktur terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui kementerian yang ada, pembangunan infrastruktur dilakukan secara terus menerus demi mendukung aktivitas ekonomi di Indonesia. Pembangunan di berbagai sektor memiliki efek yang signifikan terhadap pengembangan wilayah dan menciptakan lapangan kerja baru. Pemerintah melalui kementerian saling bersinergi dan berinovasi, Kementerian yang membangun infrastruktur di Indonesia diantaranya kementerian perhubungan dengan membangun bandara, terminal dan lain-lain, kementerian pariwisata dengan pembangunan tempat wisata, dan kementerian PUPR seperti pembangunan rumah sakit, perbaikan sekolah, jembatan dan lainnya yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Kementerian PUPR memiliki kelebihan dengan menggunakan sumberdaya alam dan sumber daya manusia pada lokasi yang sedang dikelola, hal ini membuat peneliti ingin membahas terkait kementerian PUPR.

Kementerian PUPR telah fokus pada pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat, termasuk di antaranya pembangunan jalan, jembatan, irigasi, air minum, dan perumahan.

Selain fungsi Kementerian PUPR dalam pembangunan infrastruktur nasional, sangat penting memprioritaskan komunikasi pembangunan infrastruktur berwawasan kearifan lokal untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Komunikasi yang efektif dapat membantu membangun kepercayaan dan pemahaman antara masyarakat dan pemerintah, sehingga masyarakat dapat ikut berperan aktif dalam Pembangunan (Suri, 2019). Komunikasi

pembangunan infrastruktur yang harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Pemerintah harus memberikan informasi yang jelas dan transparan tentang rencana pembangunan, serta mendengarkan aspirasi masyarakat. Pemerintah juga harus menghormati kearifan lokal masyarakat, sehingga pembangunan infrastruktur dapat berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan konflik.

Namun, dalam pelaksanaannya, pembangunan infrastruktur seringkali menimbulkan konflik dengan masyarakat lokal, terutama terkait dengan kearifan lokal (Nulhaqim et al., 2020). Misalnya, kasus pembangunan wisata alam di Pulau Rinca. Dalam kasus ini, Kementerian PUPR tidak melakukan komunikasi yang efektif dengan masyarakat lokal terkait dengan rencana serta dampak dari pembangunan Pulau Rinca sebagai wisata alam premium (Ciptaning & Ulfarun, 2023). Akibatnya, timbul konflik dengan masyarakat adat sekitar karena dibatasinya ruang lingkup pengembangan pariwisata terkait sterilisasi kawasan.

Selain itu, komunikasi Humas juga dapat menimbulkan konflik sosial. Hal ini terjadi karena masyarakat merasa bahwa kearifan lokal mereka tidak dihargai oleh pemerintah (Wiguna et al., 2023). Konflik sosial ini dapat berdampak negatif terhadap pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengatasi kendala komunikasi dalam pembangunan infrastruktur, pemerintah perlu meningkatkan komunikasi dengan masyarakat lokal. Komunikasi yang efektif harus dilakukan sejak awal perencanaan pembangunan infrastruktur (Hairunnisa & Syaka, 2022). Pemerintah perlu melibatkan masyarakat lokal dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Dengan demikian,

masyarakat lokal dapat memahami dampak pembangunan infrastruktur dan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Di sisi lain, keberhasilan komunikasi yang dilakukan oleh Humas Kementerian PUPR menjaga kearifan lokal dalam pembangunan Rumah Tradisional Bolon di Hutaraja dan Huta Siallagan, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara (Suita et al., 2021). Rumah Gorga menjadi salah satu obyek wisata favorit di Kabupaten Samosir. Selain memiliki banyak Rumah Bolon, Hutaraja merupakan kampung tenun ulos yang sangat terkenal. Kampung ini menjadi workshop atau tempat latihan bagi masyarakat yang ingin mengenal lebih dekat tradisi dan budaya Batak. Rumah-rumah Bolon pun kerap dijadikan *homestay* untuk para wisatawan.

Salah satu bentuk kearifan lokal yang dilestarikan dalam pembangunan Rumah Bolon ini adalah melibatkan para tokoh adat serta tukang-tukang lokal berpengalaman dan penggunaan atap daun rumbia, bahan alami yang mudah ditemukan di Sumatera. Sosialisasi yang melibatkan tokoh adat saat perencanaan membuat pembangunan yang dilakukan Kementerian PUPR ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan masyarakat setempat (Suita et al., 2021).

Renovasi Rumah Bolon di Hutaraja dan Huta Siallagan diharapkan mampu meningkatkan daya tarik pariwisata Kabupaten Samosir sehingga memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakatnya.

Dengan pemaparan di atas diketahui bahwa perlu dilakukan eksplorasi lebih lanjut mengenai bagaimana Strategi Komunikasi Humas Kearifan Lokal oleh Kementerian PUPR sebagai perumusan masalah. Sehingga, tujuan penelitian ini

adalah untuk mengeksplorasi strategi komunikasi yang diadopsi oleh Kementerian PUPR dalam mengimplementasikan pembangunan infrastruktur oleh Humas dan berbasis kearifan lokal serta memberikan wawasan tentang bagaimana proyek-proyek ini berkontribusi terhadap pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

Oleh karena itu, penelitian ini secara akademis diharapkan dapat memperkaya kajian komunikasi pembangunan, khususnya dalam bidang pembangunan infrastruktur dan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang strategi komunikasi yang diadopsi oleh Kementerian PUPR dalam mengimplementasikan pembangunan infrastruktur. Selain itu secara praktis, penelitian ini dapat meningkatkan efektivitas komunikasi pembangunan yang dilakukan oleh Kementerian PUPR serta memberikan rekomendasi bagi Kementerian PUPR untuk meningkatkan strategi komunikasinya agar lebih efektif dalam mencapai tujuan pembangunan infrastruktur.

TINJAUAN LITERATUR

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai kekayaan ilmu penelitian ini. Penelitian pertama oleh Mohammad Ribhul Azeem dengan judul Strategi Humas Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Dalam Pengelolaan Jejaring Sosial, 2018. Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kasus kualitatif dengan mengangkat kasus berupa pengelolaan jejaring media sosial yang terjadi di Divisi Hubungan Masyarakat Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Hasil yang didapat dalam penelitian ini menggambarkan bahwa

pentingnya beberapa aspek yang mampu meningkatkan pengelolaan jejaring media sosial di Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia yang baik seperti pengelolaan tanda informasi, umpan balik, pengembangan fokus dan juga pemanfaatan Bahasa (Azeem & Toni, 2018)

Penelitian ke dua Aulia Rahman dan Diah Fatma Sjoraida, 2017 Strategi Komunikasi Pemerintah Kabupaten Subang Menyosialisasikan Gerakan Pembangunan Untuk Rakyat Infrastruktur Berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Strategi Komunikasi Pemerintah Kabupaten Subang Untuk Menyosialisasikan Program “Gerakan Pembangunan Untuk Rakyat”, khususnya salah satu dari program Kabupaten Subang mengenai pengembangan infrastruktur untuk masyarakat yang disebut GAPURA INTAN (Gerakan Pembangunan Untuk Masyarakat Infrastruktur Berkelanjutan). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma konstruktivisme dan menggunakan metode studi kasus. Hasil penelitian ini adalah, infrastruktur merupakan permasalahan paling mendesak di Kabupaten Subang. Program GAPURA INTAN bertujuan untuk menangani permasalahan infrastruktur seperti salah satunya perbaikan jalan Kabupaten yang rusak sehingga tidak bisa digunakan oleh masyarakat (Rahman & Sjoraida, 2017).

Selanjutnya penelitian ke tiga dilakukan oleh Feridian Pratama, 2019 Strategi *Public Relations* PT Commonwealth Life Jakarta Dalam Membangun Citra Perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berbagai strategi yang dilakukan oleh *Public Relations* PT Commonwealth Life Jakarta dalam membangun citra perusahaan.

Desain penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Commonwealth Life ingin mengokohkan citra perusahaan sebagai teman setia masyarakat Indonesia yang senantiasa ikut serta dalam membangun kesejahteraan yang lebih baik (Pratama, 2019).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan jenis deskriptif untuk menggambarkan fenomena yang terjadi secara mendalam dari sudut pandang informan, dan membahas terkait Strategi Komunikasi Humas Kementerian PUPR Dalam Menjaga Kearifan Lokal Untuk Pembangunan Berkelanjutan.

Pengertian Humas (Hubungan Masyarakat)

The *Public Relations* of America menyebutkan bahwa Humas atau *Public Relations* adalah usaha organisasi untuk memperoleh kerja sama dari sekelompok orang. Humas membantu organisasi berinteraksi secara efektif dan berkomunikasi dengan publik utama (Rais, 2019). Menurut kamus Institut of *Public Relations* (IPR) terbitan bulan November 1978 yang dikutip dari Purba (2018) disebutkan bahwa “Praktik Humas adalah keseluruhan upaya yang dilakukan secara terencana dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan dan memelihara niat baik dan saling pengertian antara suatu organisasi dengan segenap khalayaknya”.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Humas merupakan suatu komponen penting yang harus dimiliki oleh setiap organisasi, lembaga atau perusahaan sebagai penjembaran dan mengatur segala bentuk komunikasi yang nantinya akan menimbulkan saling pengertian antara suatu lembaga dan khalayaknya. Azeem

(2018) menjelaskan bahwa Humas menekankan pada esensi *Public Relations*, yaitu *delebrate, planned, and sustained effort to establish and maintain mutual understanding between and organization and its public*. Humas juga bisa diartikan sebagai sesuatu yang terdiri dari semua bentuk komunikasi berencana baik ke dalam maupun keluar yang bertujuan untuk mendapatkan citra positif dan dukungan dari publiknya.

Dalam lingkungan pemerintahan istilah Humas tampak lebih populer dibandingkan dengan *Public Relations* (Sinaga et al., 2020). Perbedaan pokok antara fungsi dan tugas Humas yang terdapat di instansi pemerintah dengan non pemerintah (lembaga komersial) adalah tidak adanya unsur komersial (Rahman & Sjoraida, 2017). Humas pemerintah lebih menekankan pada *public services* atau demi meningkatkan pelayanan umum. Melalui unit atau program kerja Humas, pemerintah dapat menyampaikan informasinya mengenai kebijaksanaan dalam melaksanakan tugas (Kusuma & Paselle, 2017).

Menurut Ahmad S. Adnanputra, Presiden Institut Bisnis dan Manajemen Jayakarta, strategi Humas adalah alternatif optional yang dipilih untuk ditempuh guna mencapai tujuan hubungan masyarakat dalam kerangka suatu rencana hubungan masyarakat (*Public Relations plan*) (Romansyah, 2017). Humas yang baik atau kompeten adalah Humas yang mampu melakukan sebuah strategi yang baik untuk berkomunikasi dengan berbagai macam pihak yang berkepentingan tentang alasan pergeseran dan dampaknya terhadap misi dan prioritas organisasi (Maulidatur Rohmah, 2019).

Suatu organisasi membutuhkan strategi Humas untuk memperoleh target

yang sudah direncanakan pada jangka waktu pendek maupun jangka waktu yang panjang, dan mengantisipasi suatu masalah yang tidak diinginkan (Dense & Pramono, 2022). Di samping itu, Humas juga memiliki strategi yang penting berkaitan dengan kehidupan *stakeholder* yakni Humas harus mampu menjalankan sebuah strategi yang mampu membangun strategi penyampaian pesan yang baik dan efektif kepada *stakeholder* internal maupun eksternal (Hendrarto & Ruliana, 2019).

Humas mempunyai tugas yang sangat penting, tidak hanya membangun tetapi juga mempertahankan sebuah hubungan dengan baik dan memiliki manfaat bagi organisasi dan publik yang akan memengaruhi kesuksesan dan kegagalannya demi terwujudnya citra yang baik (Fatimah & Hadi, 2022).

Peran Humas dalam membangun citra positif dapat terlaksana dengan adanya strategi yang terencana dan matang. Strategi hubungan masyarakat atau hubungan nasional menurut Ruslan (dalam Pratama, 2019) dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. *Publications* : Setiap fungsi dan tugas Humas adalah menyelenggarakan publikasi atau menyebarluaskan informasi.
2. *Kegiatan* : Merancang sebuah kegiatan yang bertujuan untuk memperkenalkan produk dan layanan perusahaan atau instansi, mendekatkan diri ke publik dan lebih jauh lagi dapat memengaruhi opini publik.
3. *News (Menciptakan Berita)* : Berupaya menciptakan berita melalui *press release, news letter, bulletin*, dan lain-lain. Untuk itulah seorang Humas harus mempunyai kemampuan menulis dan menciptakan publisitas.

4. *Community Involvement* (Kepedulian pada Komunitas) : Keterlibatan tugas sehari-hari seorang Humas adalah mengadakan kontak sosial dengan kelompok masyarakat tertentu guna menjaga hubungan baik (*community relation dan humanity relation*) dengan pihak organisasi atau lembaga yang diwakili.
5. *Lobbying and Negotiations* (Melobi dan Bernegosiasi) : Keterampilan untuk melobi melalui pendekatan pribadi dan kemampuan bernegosiasi, sangat diperlukan bagi seorang Humas.

Peran Hubungan Masyarakat Terhadap Hasil Pembangunan Infrastruktur

Hubungan Masyarakat (Humas) memiliki peran yang sangat penting terhadap hasil pembangunan infrastruktur (Hulu & Wahyuni, 2021). Humas berperan sebagai jembatan penghubung antara Kementerian PUPR dengan masyarakat luas. Melalui kegiatan-kegiatan komunikasi, Humas dapat mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pembangunan infrastruktur keberlanjutan, serta manfaat dan dampak positif yang akan diperoleh dari pembangunan tersebut (Amanatin et al., 2023). Secara lebih spesifik, peran Humas terhadap hasil pembangunan infrastruktur keberlanjutan Kementerian PUPR dapat dirinci sebagai berikut (Habib, 2021; Hasibuan & Sulaiman, 2019):

1. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pembangunan infrastruktur keberlanjutan: Humas dapat melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Humas dapat menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan tidak

hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga aspek sosial dan lingkungan.

2. Membangun dukungan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur keberlanjutan: Humas dapat membangun dukungan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Humas dapat melakukan komunikasi yang efektif dengan masyarakat, sehingga masyarakat memahami dan mendukung pembangunan tersebut.
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Kementerian PUPR: Humas dapat melakukan komunikasi yang transparan dan akuntabel, sehingga masyarakat yakin bahwa Kementerian PUPR telah bekerja secara profesional dan bertanggung jawab.

Kementerian PUPR telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan peran Humas dalam mendukung hasil pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan membentuk Bagian Hukum dan Komunikasi Publik di setiap unit organisasi di lingkungan Kementerian PUPR, salah satunya Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya. Bagian Hukum dan Komunikasi Publik bertugas untuk melakukan komunikasi publik terkait pembangunan infrastruktur berkelanjutan, baik kepada masyarakat umum maupun kepada pemangku kepentingan.

Kearifan Lokal dalam Pembangunan

Istilah kearifan lokal dalam wacana kebangsaan semakin populer dalam satu dekade terakhir ini. Kajian tentang tema kearifan lokal semakin berkembang, karena kemunculan dan popularitasnya dalam

masa setelah runtuhnya Orde Baru, istilah kearifan lokal dapat dilihat sebagai respon terhadap situasi baru yang muncul pada masa reformasi (Wahyuningsih, 2021). Orientasi pembangunan dalam perspektif modernitas di masa Orde Baru dipertanyakan secara serius oleh banyak kalangan pada masa reformasi. Kearifan lokal adalah nilai-nilai, norma, dan kepercayaan yang hidup dalam masyarakat dan menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Kearifan lokal memiliki peran penting dalam pembangunan berkelanjutan, termasuk pembangunan infrastruktur. Dalam pembangunan infrastruktur, kearifan lokal dapat memberikan manfaat sebagai berikut (Arsani & Kurniawan, 2018; Hidayati, 2017; Sianturi et al., 2023) : 1). Meningkatkan kesesuaian infrastruktur dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat. 2). Meningkatkan keberlanjutan pembangunan infrastruktur, 3). Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur:

Penerapan pembangunan infrastruktur berbasis kearifan lokal yang berkelanjutan oleh Kementerian PUPR di Indonesia mencakup berbagai inisiatif dan proyek yang dirancang untuk mengintegrasikan nilai-nilai lokal, praktek keberlanjutan, dan teknologi modern. Contoh-contoh berikut menggambarkan bagaimana Kementerian PUPR menerapkan pendekatan ini dalam berbagai proyek:

1. Pembangunan Jalan dengan Material Lokal.
2. Revitalisasi Kawasan Permukiman dengan Pendekatan Kearifan Lokal.
3. Pengelolaan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat: Implementasi proyek pengelolaan sumber daya air yang mengadopsi sistem irigasi tradisional.

4. Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan dalam Pembangunan Infrastruktur.
5. Restorasi Bangunan Bersejarah dengan Teknik Tradisional.

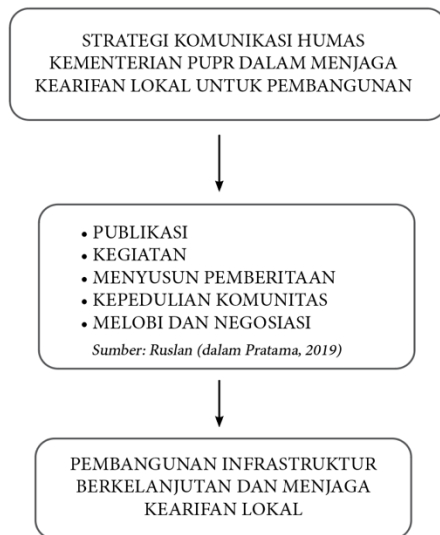
Kerangka Pemikiran

Penelitian ini berfokus pada strategi komunikasi yang diterapkan oleh Humas Kementerian PUPR dalam mendukung pelestarian kearifan lokal seiring dengan peningkatan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Ruslan (dalam Pratama, 2019) menyusun strategi Humas atau hubungan nasional yang terdiri dari beberapa elemen kunci.

Pertama, fungsi utama *Public Relations* adalah menyelenggarakan publikasi atau penyebaran informasi. Selanjutnya, strategi mencakup perencanaan kegiatan yang bertujuan memperkenalkan produk dan layanan perusahaan atau instansi, mendekatkan diri ke publik, dan berpotensi mempengaruhi opini publik. Poin ketiga adalah menciptakan berita melalui *press release*, *news letter*, dan *bulletin* untuk membangun publisitas. Sementara itu, keterlibatan dalam kontak sosial dengan kelompok masyarakat tertentu menjadi bagian dari tanggung jawab sehari-hari, menjaga hubungan baik dengan *community relation* dan *humanity relation*. Kemudian, keterampilan melobi dan bernegosiasi secara personal diakui sebagai aspek penting dalam strategi ini. Terakhir, pentingnya tanggung jawab sosial dalam aktivitas Humas menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat dan dapat meningkatkan citra instansi atau perusahaan di mata publik. Dalam konteks Kementerian PUPR, penerapan strategi ini diharapkan dapat efektif dalam mengomunikasikan pembangunan

infrastruktur dan menjaga kearifan lokal kepada masyarakat, sesuai dengan kerangka teori pada penelitian ini sebagai berikut;

Gambar 1. Kerangka Pemikiran



Sumber : Peneliti (2024)

METODOLOGI PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme, dengan pendekatan kualitatif dan sifat penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau nilai satu atau lebih variabel secara mandiri (Sugiyono, 2019).

Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam dari sudut pandang informan. Sifat penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan strategi komunikasi yang diadopsi oleh Kementerian PUPR dalam mengimplementasikan pembangunan infrastruktur berbasis kearifan lokal. Penelitian ini dilakukan di lapangan dengan

metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci di Kementerian PUPR, observasi partisipan, dan analisis dokumen. Data dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif yang berfokus pada makna dan interpretasi data. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dan praktis dalam bidang komunikasi pembangunan, khususnya dalam pembangunan infrastruktur.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data untuk penelitian terkait Strategi komunikasi Humas Kementerian PUPR dalam menjaga kearifan lokal melibatkan dua tahap utama: studi pustaka dan wawancara. Dalam tahap studi pustaka, peneliti melakukan analisis literatur terkait konsep kearifan lokal, strategi komunikasi, dan implementasi pembangunan infrastruktur oleh Kementerian PUPR. Studi ini memberikan landasan teoritis dan kontekstual bagi penelitian, memungkinkan peneliti untuk memahami dasar-dasar kebijakan dan praktik komunikasi yang telah ada. Tahap wawancara dilakukan dengan informan kunci (narasumber utama) yaitu Ary Prasetyo selaku Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya, Kementerian PUPR.

Pemilihan beliau sebagai key informan dalam penelitian ini didasarkan pada perannya yang krusial dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Kementerian PUPR. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang strategi komunikasi yang diadopsi oleh Kementerian PUPR, terutama yang terkait dengan pelestarian kearifan lokal dalam pembangunan infrastruktur.

Informan selanjutnya yaitu Kusumawardhani, menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Perencanaan Teknis Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, yang juga diikutsertakan sebagai narasumber tambahan untuk memberikan perspektif lebih lanjut mengenai konsep pembangunan infrastruktur berbasis kearifan lokal.

Kehadiran kedua narasumber ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang upaya komunikasi yang dilakukan oleh Kementerian PUPR dengan mempertimbangkan nilai-nilai kearifan lokal. Wawancara dengan mereka akan memberikan data kualitatif yang mendalam mengenai pemahaman dan implementasi strategi komunikasi, serta bagaimana hal tersebut terkait dengan upaya pelestarian kearifan lokal oleh Kementerian PUPR.

Teknik Analisis Data

Analisis data hasil wawancara dilakukan dengan proses koding agar dapat lebih mudah dipahami. Analisis data coding yang terdiri dari tiga tahap - yaitu *open coding*, *axial coding*, dan *selective coding* - sangat relevan dalam mengungkap strategi komunikasi yang diadopsi oleh Kementerian PUPR dalam mengimplementasikan pembangunan infrastruktur melalui Humas dan berbasis kearifan lokal. Tahap pertama, *open coding*, melibatkan pengidentifikasian dan pencatatan berbagai konsep dan tema yang muncul dari data.

Dalam konteks ini, data yang dikumpulkan mencakup wawancara dengan para pejabat dan analisis dokumen terkait strategi komunikasi dan pembangunan infrastruktur. Selanjutnya, *axial coding* memungkinkan penyusunan hubungan antara konsep-konsep yang telah

diidentifikasi, seperti bagaimana kearifan lokal diintegrasikan ke dalam strategi komunikasi yang dilakukan oleh Humas Kementerian PUPR. Tahap ini memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana elemen-elemen tersebut saling terkait dan berkontribusi terhadap keseluruhan strategi komunikasi. Akhirnya, *selective coding* memungkinkan penekanan pada konsep-konsep utama yang muncul dari analisis, seperti keberlanjutan, partisipasi masyarakat, dan pemahaman budaya lokal. Dalam tahap ini, fokus diberikan pada pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana strategi komunikasi yang diadopsi oleh Kementerian PUPR dapat ditingkatkan atau disesuaikan dengan kebutuhan kontekstual dan kearifan lokal yang ada. Dengan demikian, melalui pendekatan analisis data *coding* tiga tahap ini, kita dapat memperoleh wawasan yang lebih komprehensif tentang strategi komunikasi Kementerian PUPR dalam mengimplementasikan pembangunan infrastruktur dengan memanfaatkan Humas dan kearifan lokal.

Adapun untuk dalam menguji keabsahan data, penelitian ini menggunakan Triangulasi yang merupakan suatu cara untuk mendapatkan data yang benar-benar pasti. Cara bekerjanya triangulasi ini adalah dengan melakukan pemeriksaan kepastian atau validitas data yaitu memanfaatkan hal lain dari data tersebut, dalam melakukan pengecekan dan membandingkan data itu sendiri. Alasan peneliti menggunakan triangulasi karena peneliti beranggapan bahwa triangulasi lebih cepat dalam pengecekan keabsahan pada penelitian ini. Triangulasi dengan pengujian kredibilitas sama halnya dengan pengecekan suatu data dari beberapa sumber dengan berbagai cara

serta berbagai waktu. Selain itu triangulasi yang digunakan pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan metode yang dilakukan dengan cara mengecek data yang sudah diperoleh melalui beberapa sumber. Keabsahan data yang diteliti oleh peneliti sudah jenuh atau valid.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wawancara dilakukan kepada dua informan kunci yaitu Ary Prasetyo selaku Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian PUPR yang bertanggung jawab atas pengelolaan informasi dan komunikasi publik Ditjen Cipta Karya, termasuk publikasi, media sosial, dan hubungan media. Selanjutnya pemegang jabatan Kepala Subdirektorat Perencanaan Teknis, Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Kusumawardhani. Adapun hasil wawancara dari kedua narasumber sebagai berikut;

Publikasi

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, bagian Hukum dan Komunikasi Publik yang berperan sebagai Humas Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR memiliki peran krusial dalam menyelenggarakan publikasi serta menyebarluaskan informasi terkait dengan pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan pelestarian kearifan lokal. Humas Ditjen Cipta Karya bertanggung jawab untuk memastikan bahwa berbagai kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh kementerian ini dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat luas. Melalui upaya publikasi ini, mereka berperan sebagai jembatan komunikasi antara kementerian dengan publik, menciptakan pemahaman yang lebih baik

tentang upaya pembangunan yang dilakukan serta mempromosikan kesadaran akan pentingnya keberlanjutan dan pelestarian budaya lokal. Dengan demikian, fungsi Humas Ditjen Cipta Karya tidak hanya terfokus pada penyampaian informasi, tetapi juga pada pembentukan pemahaman positif dan dukungan masyarakat terhadap kebijakan dan program pembangunan yang dijalankan oleh kementerian tersebut.

Berikut Kutipan dari Pernyataan Ary:

"Humas Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR menjalankan strateginya dengan melakukan publikasi melalui poster dan brosur yang dipasang di balai desa, pendopo, dan ruang publik lainnya saat melakukan sosialisasi. Hal ini menekankan pentingnya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat dan dampak dari pembangunan berkelanjutan yang kita lakukan."

"Sehingga, masyarakat terlibat secara aktif dan menjadi kunci untuk mencapai kesuksesan dalam upaya pelestarian lingkungan dan kearifan lokal."

Adapun kutipan dari Kusumawardhani terkait komunikasi publikasi hubungan masyarakat sebagai berikut.

"Publikasi, media sosial, dan hubungan media menjadi alat utama dalam menciptakan pemahaman yang baik di kalangan masyarakat, sehingga dapat tercipta dukungan yang kuat untuk pembangunan yang berkelanjutan dan pelestarian nilai-nilai lokal."

"...melalui berbagai media yang ada dalam website pun dijelaskan pula perencanaan pembangunan yang akan dilakukan. Bagaimana proses pembangunannya dapat melibatkan

partisipasi masyarakat serta menghargai kearifan lokal yang ada serta penggunaan bahan material alami yang ada di lingkungan sekitar pembangunan..."

Pertukaran pendapat antara Ary dan Kusumawardhani mencerminkan pentingnya upaya publikasi yang telah dilakukan serta upaya untuk meningkatkan efektivitas komunikasi dengan masyarakat. Mereka sepakat bahwa komunikasi efektif dengan memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat melalui media publikasi merupakan langkah penting dalam meningkatkan pemahaman dan dukungan masyarakat terhadap upaya pembangunan berkelanjutan.

Kegiatan

Merancang sebuah kegiatan yang bertujuan untuk memperkenalkan produk dan layanan perusahaan atau instansi adalah langkah yang strategis dalam membangun hubungan dengan publik (Toruan, 2018). Melalui kegiatan tersebut, perusahaan atau instansi dapat mendekatkan diri kepada publik secara lebih personal, menggali kesempatan untuk berinteraksi langsung, dan menjelaskan secara detail tentang produk serta layanan yang mereka tawarkan. Lebih dari sekadar promosi, perancangan kegiatan ini juga memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu mempengaruhi opini publik terkait pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan pelestarian kearifan lokal.

Dengan memperkenalkan konsep-konsep ini kepada masyarakat, perusahaan atau instansi dapat mengilhami kesadaran akan pentingnya mengembangkan industri yang berkelanjutan dan menjaga kearifan lokal dalam setiap aspek bisnisnya. Dengan demikian, kegiatan tersebut bukan hanya sebagai sarana promosi, tetapi juga sebagai wadah untuk membangun kesadaran dan

pengertian yang lebih dalam tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan atau instansi dalam membangun masa depan yang berkelanjutan.

Berikut kutipan dari pernyataan Ary:

"... Kegiatan yang dilakukan sebagai salah satu bentuk tanggung jawab sosial adalah perbaikan masjid, perbaikan jalan lingkungan, serta program penghijauan di lingkungan sekitar dan lokasi proyek."

"Hal ini sebagai upaya untuk memperoleh dukungan dan menciptakan pemahaman yang baik serta memperoleh kepercayaan dari masyarakat dalam menjaga pembangunan berkelanjutan, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam keputusan yang berkaitan dengan lingkungan dan kearifan lokal."

Berikut kutipan dari pernyataan Kusumawardhani:

"Kami di Kementerian PUPR sangat memahami pentingnya merencanakan kegiatan yang tidak hanya mengutamakan pembangunan infrastruktur berkelanjutan, tetapi juga memperhatikan pelestarian kearifan lokal. Dalam setiap langkah perencanaan, kami selalu melakukan kegiatan seminar dengan pemerintah untuk menginformasikan seluruh program inovasi infrastruktur kegiatan pembangunan, berkelanjutan dan melestarikan warisan budaya lokal."

Kedua pernyataan tersebut menunjukkan berbagai macam kegiatan yang dilakukan demi memperoleh kepercayaan dari masyarakat dalam fokus pada pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan menjaga kearifan lokal. Pentingnya melibatkan masyarakat dan memperhatikan aspek keberlanjutan dalam rangka menciptakan dukungan positif dari

opini publik. Kolaborasi yang terintegrasi antara pembangunan industri dan pelestarian kearifan lokal dianggap sebagai fondasi kuat untuk keseimbangan berkelanjutan.

Dengan demikian, kedua pernyataan tersebut menggambarkan pentingnya strategi melalui berbagai kegiatan yang melibatkan kerja sama di antara kedua belah pihak di mana dalam sebuah programnya Humas turut serta melibatkan publiknya sebagai pelaku kegiatan bukan hanya menjadikan publiknya sebagai objek yang dituju. Hal ini memberikan gambaran bahwa apa yang dilakukan PUPR memiliki sifat yang saling menguntungkan dari kedua belah pihak.

Menyusun Pemberitaan

Dalam upaya menciptakan berita yang berkualitas, seorang profesional hubungan masyarakat perlu menguasai kemampuan menulis serta mampu menciptakan publisitas yang relevan terkait pembangunan industri berkelanjutan dan pelestarian kearifan lokal. Salah satu alat yang sering digunakan dalam konteks ini adalah *press release*, yang dapat menjadi sarana efektif untuk menyampaikan informasi secara terstruktur kepada media massa (Raharjo, 2016). Selain itu, penggunaan *newsletter* dan *bulletin* juga dapat membantu menyebarkan informasi secara rutin kepada pihak-pihak terkait, seperti pelanggan, mitra bisnis, dan masyarakat luas (Utami et al., 2018). Dengan demikian, kemampuan menulis yang baik dan pemahaman mendalam tentang industri berkelanjutan menjadi kunci bagi seorang praktisi hubungan masyarakat untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan menciptakan publisitas yang positif, mendukung pembangunan

industri berkelanjutan, dan mempromosikan pelestarian kearifan lokal.

Dalam wawancara dengan Ary Prasetyo, Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Ditjen Cipta Karya, beliau menekankan pentingnya perancangan strategis dalam menciptakan berita melalui berbagai sarana seperti media *press release*, media sosial, dan bulletin.

"Sebagai seorang Humas, kemampuan menulis bukan hanya sekadar keterampilan, tetapi suatu kebutuhan esensial untuk menyampaikan pesan terkait pembangunan industri berkelanjutan dan pelestarian kearifan lokal," ungkapnya. "

"Proses pembuatan press release yang dilakukan dengan menyiapkan bahan materi pembuatan press release, membuat press release dari bahan yang sudah diperoleh, dan proses unggah press release ke website Kementerian PUPR. Proses penyebaran press release yang telah dibuat disebar melalui media internal dan media eksternal." tambahnya.

Berikut kutipan dari pernyataan Kusumawardhani:

"PUPR senantiasa melaksanakan koordinasi dengan unit kerja tertentu dalam menyediakan fakta-fakta yang terukur dalam setiap penyebaran informasi yang disajikan melalui press release maupun bulletin kepada publik. Diseminasi informasi publik dilakukan melalui sebuah prosedur yang melibatkan seluruh unit kerja yang mempunyai kewajiban dalam menyediakan informasi secara berkala kepada publik, dan akan disebar melalui website resmi dan media daerah proyek khususnya. Adakalanya terjadi hambatan dimana tidak ada bahan berita yang akan dimuat."

Dengan demikian, kedua pernyataan tersebut menegaskan pentingnya tanggung jawabnya yang luas

dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik melalui *press release* maupun *bulletin* yang disebarakan melalui media internal dan eksternal.

Ary, sebagai seorang pemimpin di bidang komunikasi publik, menegaskan bahwa penguasaan kemampuan dalam membuat *press release* dapat menciptakan publisitas yang relevan adalah kunci dalam memastikan bahwa informasi yang disampaikan mendukung visi dan misi Kementerian PUPR dalam mengelola pembangunan infrastruktur secara berkelanjutan dan menjaga kearifan lokal.

Kepedulian Komunitas

Seorang profesional hubungan masyarakat memiliki tanggung jawab yang luas, terutama dalam menjalankan tugas sehari-hari yang mencakup pengelolaan kontak sosial dengan kelompok masyarakat tertentu. Fokus utama dari aktivitas ini adalah menjaga hubungan baik, baik dalam konteks *community relation* maupun *humanity relation*, dengan pihak organisasi atau lembaga yang diwakilinya. Dalam konteks pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan menjaga kearifan lokal, peran Humas menjadi semakin penting. Mereka harus mampu membangun jaringan yang solid dengan berbagai pihak terkait, mulai dari komunitas lokal, mitra bisnis, hingga pemangku kepentingan lainnya. Melalui komunikasi yang efektif, hubungan masyarakat dapat memberikan informasi yang mendukung visi dan misi terkait pembangunan berkelanjutan (Yuliant, 2018).

Dalam wawancara dengan Ary, Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR, beliau mengungkapkan esensi keterlibatan tugas sehari-hari seorang hubungan masyarakat terkait pembangunan

infrastruktur berkelanjutan dan pelestarian kearifan lokal. "*Tugas sehari-hari seorang hubungan masyarakat tidak hanya terbatas pada aspek teknis komunikasi, namun juga mencakup keterlibatan sosial yang erat dengan kelompok masyarakat tertentu, melalui hubungan kerja sama. Hubungan kerja sama ini dilakukan melalui sebuah forum, di mana dalam forum tersebut disampaikan tentang rencana kerja Humas PUPR dalam penyediaan Informasi Publik. Hal ini dilakukan dengan tujuan menjaga hubungan baik, baik dalam konteks community relation maupun humanity relation, dengan pihak organisasi atau lembaga yang diwakili*" ungkapnya.

Di sisi lain, wawancara dengan Kusumawardhani, beliau menekankan konteks pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan menjaga kearifan lokal, keterlibatan membina hubungan kerja sama dengan media untuk memperoleh opini publik yang positif, tentunya untuk memahami dan merespons kebutuhan serta aspirasi masyarakat..

"*Hubungan kerja sama dengan media dilakukan demi mencapai tujuan dari masing-masing pihak, di mana kepentingan publikasi kementerian PUPR, dan kebutuhan media akan berita.*"

Dari kedua wawancara dengan Ary Prasetyo dan Kusumawardhani terkait kepedulian pada komunitas dan masyarakat setempat di sekitar pembangunan infrastruktur, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan aktif dan erat dengan kelompok masyarakat menjadi aspek krusial dalam tugas sehari-hari, kepedulian tersebut menjalin suatu kerja sama melalui sebuah forum baik itu organisasi masyarakat dan media sehingga memunculkan *community relation* dan *humanity relation*. Dalam konteks pembangunan infrastruktur, keterlibatan aktif dengan masyarakat

menjadi poin kritis yang tidak hanya mencakup aspek teknis, tetapi juga menekankan pada kepedulian, pemahaman, dan dukungan terhadap kearifan lokal. Hubungan masyarakat tidak hanya sebagai penyampai pesan, tetapi juga sebagai fasilitator dalam membangun hubungan yang positif dan berkelanjutan dengan masyarakat setempat.

Lobby dan Negosiasi

Dalam konteks pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan pelestarian kearifan lokal, keterampilan melobi melalui pendekatan pribadi dan kemampuan bernegosiasi menjadi elemen kunci bagi seorang profesional hubungan masyarakat. Melalui pendekatan pribadi, seorang praktisi hubungan masyarakat dapat memahami kebutuhan dan keinginan stakeholder dengan lebih mendalam, sehingga memungkinkan pengembangan kebijakan dan program yang lebih tepat sasaran (Susilawati, 2017). Kemampuan bernegosiasi menjadi alat yang efektif dalam memastikan keberlanjutan pembangunan infrastruktur tanpa mengorbankan kearifan lokal. Dengan cara ini, seorang ahli Humas dapat memainkan peran strategis dalam memfasilitasi kolaborasi yang berkelanjutan antara berbagai pihak yang terlibat, menciptakan lingkungan di mana pembangunan infrastruktur dapat sejalan dengan pelestarian nilai-nilai lokal yang berharga.

Dalam wawancara dengan Ary, Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR, beliau menyoroti pentingnya keterampilan melobi melalui pendekatan pribadi dan kemampuan bernegosiasi bagi seorang hubungan masyarakat dalam konteks pembangunan infrastruktur

berkelanjutan dan pelestarian kearifan lokal.

"Melobi dan bernegosiasi membuka pintu untuk membangun kemitraan yang kuat dengan berbagai pihak terkait. Hal ini menjadi kunci dalam mendukung upaya pembangunan industri berkelanjutan dan pelestarian kearifan lokal, memastikan bahwa kepentingan masyarakat dan organisasi sejalan."

"Penentuan sasaran dilakukan melalui forum komunikasi yang dilakukan oleh Biro Humas Pusjatan PUPR dan perwakilan masyarakat." tambahnya.

Dalam wawancara dengan Kusumawardhani, Kepala Subdirektorat Perencanaan Teknis, beliau menekankan pentingnya keterampilan untuk melobi melalui pendekatan pribadi dan kemampuan bernegosiasi dalam konteks pembangunan industri berkelanjutan dan pelestarian kearifan lokal.

"Tentunya hal ini penting dilakukan Humas PUPR selalu melakukan lobi dan negosiasi pada saat akan melakukan pekerjaan proyek dimana melalui perwakilan PUPR dan Tokoh adat, sesepuh desa/wilayah, dan pemangku kepentingan terkait hal ini dilakukan dalam memastikan keselarasan antara kebijakan pembangunan dan kebutuhan masyarakat"

"Saya percaya bahwa kemampuan untuk berinteraksi secara personal dan bernegosiasi dengan berbagai pihak merupakan landasan utama dalam menjalankan tugas sebagai juru bicara" tambahnya.

Kusumawardhani menegaskan bahwa melalui keterampilan ini, seorang hubungan masyarakat dapat memastikan bahwa kepentingan masyarakat dipahami dan diakomodasi dalam setiap kebijakan dan inisiatif pembangunan yang dijalankan

oleh Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR.

Ary dan Kusumawardhani menyoroti bahwa lobi dan negosiasi merupakan peran krusial dalam konteks pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan pelestarian kearifan lokal. Keduanya sepakat bahwa hal ini menjadi kebutuhan esensial bagi seorang Humas, terutama dalam lingkup tugas yang mencakup pengelolaan informasi dan komunikasi publik. Ary menegaskan bahwa keterampilan melobi dan bernegosiasi membuka pintu untuk membangun kemitraan yang kuat dengan berbagai pihak terkait, memberikan kontribusi signifikan dalam mencapai tujuan komunikasi publik, dan memastikan pesan-pesan terkait pembangunan berkelanjutan dapat diartikulasikan dengan efektif kepada publik. Sementara itu, Kusumawardhani menyatakan bahwa keterampilan melobi dan kemampuan bernegosiasi sangat diperlukan, terutama dalam memastikan keselarasan antara kebijakan pembangunan dan kebutuhan masyarakat.

Kesimpulan ini menggaris bawahi bahwa melobi dan bernegosiasi bukan hanya menjadi aspek tambahan dalam peran Humas, tetapi merupakan landasan utama yang mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan dan menjaga kearifan lokal.

KESIMPULAN

Penelitian ini menggambarkan bahwa strategi komunikasi Humas memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kearifan lokal dan upaya pembangunan infrastruktur berkelanjutan di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR. Pembahasan di atas menjelaskan bahwa Humas Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR telah

berhasil menjalankan strategi komunikasinya.

Saran yang diberikan kepada Kementerian PUPR sebaiknya lebih meminimalisir hambatan dalam penyusunan berita sehingga penyediaan informasi publik tetap ada dan untuk menghindari kesalahan data yang hendak disajikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriansyah, A., & Dini Dwi Kusumaningrum, D. K. K. (2020). *Pendidikan Sebagai jalan Terang: Membangun Pendidikan yang Responsif terhadap Kondisi Geografis, Demografi, Sosial, dan Budaya Orang Asli Papua*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Andini, R. (2023). Inovasi Teknologi untuk Pariwisata Hijau: Solusi Berkelanjutan di Era Modern. *Jurnal Kajian Pariwisata Dan Perhotelan*, 1(2), 39–44.
- Angguniko, B. Y., & Hidayah, S. (2017). Rancangan unit pengelola irigasi modern di Indonesia. *Jurnal Irigasi*, 12(1), 23–36.
- Arsani, A. M., & Kurniawan, M. A. (2018). Infrastructure Sharing for Acceleration of Economic Equality in Indonesia Islands Regions. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 2(3), 291–308.
- Azeem, M. R. (2018). Strategi Humas Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Dalam Pengelolaan Jejaring Sosial. *Jurnal Komunikasi*, 10(2), 115–130.

- Ciptaning, Benedikta Irene, P., & Ulfarun, Fatma, N. (2023). Konflik Pembangunan Wisata Premium Di Pulau Rinca Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional*, 2(3), 267.
- Dense, A., & Pramono, S. A. H. (2022). Strategi Public Relations “Chiki Twist” Dalam Meningkatkan Brand Awareness. *Jurnal Penelitian Sosial Ilmu Komunikasi*, 6(2), 63–72. Retrieved from <https://journal.unpak.ac.id/index.php/apik>
- Fatimah, S., & Hadi, S. P. (2022). Personal Branding Menteri Perhubungan Republik Indonesia (#MenhubVlog pada YouTube Channel dalam Lingkup Generasi Milenial). *Inter Komunika: Jurnal Komunikasi*, 6(2), 49. <https://doi.org/10.33376/ik.v6i2.1434>
- Habib, M. A. F. (2021). Kajian teoritis pemberdayaan masyarakat dan ekonomi kreatif. *Ar Rehla*, 1(2), 106–134.
- Hairunnisa, H., & Syaka, W. A. (2022). Analisis Komunikasi Politik Dalam Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) Menuju Kota Berkelanjutan. *Journal of Government and Politics (JGOP)*, 4(1), 1–15.
- Hasibuan, A., & Sulaiman, O. K. (2019). Smart city, konsep kota cerdas sebagai alternatif penyelesaian masalah perkotaan kabupaten/kota, di kota-kota besar Provinsi Sumatera Utara. *Buletin Utama Teknik*, 14(2), 127–135.
- Hidayati, D. (2017). Memudarnya nilai kearifan lokal masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 11(1), 39–48.
- Hendrarto, D., & Ruliana, P. (2019). Strategi *Public Relations* Radio Delta FM Dalam Mempertahankan Pendengar Melalui Media Sosial. *Jurnal Komunikasi*, 4(2), 166–178. Retrieved from <https://journal.interstudi.edu/index.php/InterKomunika/article/view/337>
- Hulu, P. K., & Wahyuni, K. T. (2021). Kontribusi Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia Tahun 2010-2019. *Seminar Nasional Official Statistics*, 2021(1), 603–612.
- Kementerian PUPR. (2019). *Profil Keterbukaan Informasi Publik*. <https://pu.go.id/pustaka/storage/biblio/file/profil-keterbukaan-informasi-publik-1DGD9.pdf>
- Kusuma, A. R., & Paselle, E. (2017). Peran Humas Sekretariat DPRD dalam Menjalin hubungan Sinergis antara media dengan DPRD kabupaten Bulungan. *Jurnal Administrative Reform*, 3(4), 441–451.
- Lakia, S. (2022). *Dampak Infrastruktur Pembangunan Jembatan Gantung Terhadap Kondisi Ekonomi Masyarakat Desa Podol Kecamatan Tobaru Kabupaten Halmahera Barat* [Skripsi]. Universitas Khairun.
- Maulidatur Rohmah, N. F. E. (2019). *Branding Buzzer: Implementasi dan Implikasi pada Hubungan Masyarakat Pemerintahan*. *Jurnal Komunikasi*,

4(2),35–148.

- Nulhaqim, S. A., Hidayat, E. N., & Fedryansyah, M. (2020). Upaya Preventif Konflik Penggusuran Lahan. *Share: Social Work Journal*, 10(1), 109–117.
- Panggabean, E. W. (2023). Desain Rumah Khusus yang Berkearifan Lokal sebagai Upaya Melestarikan Identitas Budaya Masyarakat. *Jurnal Permukiman*, 18(2), 60–71.
- Pratama, F., & Winarni, F. (2019). Strategi *Public Relations* PT Commonwealth Life Jakarta Dalam Membangun Citra Perusahaan. *Journal of Public Policy and Administration Research*, 4(1).
- Purba, B. (2018). Pengaruh *Public Relations* terhadap peningkatan pengguna jasa di bandara internasional Kualanamu kab. Deli Serdang. *Network Media*, 1(1).
- Raharjo, R. S. (2016). Media Relations di Media Massa (Analisis Deskriptif Kualitatif Terhadap Kegiatan Media Relations TVRI Yogyakarta dan Jogja TV). *Profetik: Jurnal Komunikasi*, 8(2).
- Rahman, A., & Sjoraida, D. F. (2017). Strategi komunikasi pemerintah kabupaten Subang menyosialisasikan gerakan pembangunan untuk rakyat infrastruktur berkelanjutan. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 5(2), 136–146.
- Rais, W. (2019). Implementasi Manajemen Pendidikan Islam Dalam Konsep Manajemen Hubungan Masyarakat Dengan Sekolah. *ECONOS Jurnal Ekonomi Dan Sosial*, 10(1), 55–73.
- Romansyah, I. (2017). *Analisis Penetapan Harga Jual Produk Terhadap Volume Penjualan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Komparasi Pada Yussy Akmal Dan Shereen Cake's And Bread)* [Skripsi]. UIN Raden Intan Lampung.
- Sianturi, B. G. D., Tarigan, I. M., Depari, T. P. S., & Ivanna, J. (2023). Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Infrastruktur Di Kota Medan. *Media Informasi Penelitian Kabupaten Semarang*, 5(2), 282–287.
- Sinaga, R., Suwardi, S., & Dayana, D. (2020). Strategi Media Relations Humas Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Untuk Meningkatkan Citra Positif. *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan*, 7(2).
- Suita, D., Dafitri, H., Petrus Simorangkir, S., & Simanjuntak, J. O. (2021). Renovasi Atap Rumah Tradisional Bolon Di Daerah Huta raja Dan Siallagan. *Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 101–107. Retrieved from <http://dx.doi.org/10.30645/v1i1>.
- Suri, D. (2019). Pemanfaatan Media Komunikasi dan Informasi dalam Perwujudan Pembangunan Nasional. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 17(2), 177–187.
- Susanto, H., Mulyani, S., Sukmadilaga, C., & Ghani, E. K. (2022). Sustaining Investigative Audit Quality through Auditor Competency and Digital Forensic Support: A Consensus Study. *Sustainability*, 14(22), 15141. <https://doi.org/10.3390/su142215141>

- Susilawati, R. (2017). *Strategi Marketing Public Relations Dalam Meningkatkan Minat Client Di PT. Prudential Life Assurance* [Skripsi]. Universitas Pasundan Bandung.
- Toruan, R. R. M. L. (2018). Proses Implementasi Word of Mouth Dalam Strategi Komunikasi Pemasaran La Perla Plaza Senayan. *Jurnal Pustaka Komunikasi*, 1(1), 155–166.
- Utami, R. Y., Winangsih, R., & Muldi, A. (2018). *Strategi Media Visit PT PLN (Persero) Dalam Membina Hubungan Baik Dengan Pers (Studi Kasus Pada PT PLN (Persero) Distribusi Banten)* [Skripsi]. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Wiguna, P. M., Dewi, I. G. A. G. S., & Setyowati, R. F. (2023). Tinjauan Yuridis Ganti Kerugian Pada Pengadaan Tanah Jalan Tol Semarang-Demak Seksi Ii (Studi Di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak). *Diponegoro Law Journal*, 12(4).
- Yuliant, R. (2018). Open Access dalam Membangun Masyarakat Literat untuk Mendukung Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan. *Media Pustakawan*, 25(3), 12–22. <https://doi.org/10.37014/medpus.v25i3.207>
- Zulyanti, D. (2017). *Implementasi Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) Sebagai Model Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat Di Kelurahan Negeri Olok Gading Kecamatan Teluk*

Betung Barat Kota Bandar Lampung.
 UIN Raden Intan Lampung.